
ARTIKEL PENELITIAN

ANALISIS DETERMINAN *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP *SUSTAINABLE DEVELOPMENT* DENGAN PENDEKATAN *PARTIAL LEAST SQUARES-STRUCTURAL EQUATION MODELING*: STUDI KASUS DPRD KOTA PONTIANAK

Ade M. Yuardani[✉], Samuel Dendy Krisandi, Grace Kelly H.P.S

Politeknik Negeri Pontianak

Abstrak

Pemerintah adalah lembaga yang sah berdasarkan hukum yang berhak dan berkewajiban untuk melakukan pengawasan, mengatur, melindungi, dan menegakkan peraturan-peraturan yang sudah disepakati bersama berdasarkan dasar-dasar kehidupan, dan untuk kepentingan bersama dimana masyarakat berada. Oleh karena itu untuk mencapai pembangunan sosial ekonomi yang berkelanjutan, terdapat prinsip dari *good governance* yang digunakan sebagai acuan dan ukuran untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Tujuan dari penelitian ini untuk menilai dan menganalisa seberapa jauh prinsip *good governance* sudah terlaksana untuk mencapai tata kelola yang berkelanjutan di DPRD Kota Pontianak. Metode yang digunakan adalah *Principal Component Analysis* (PCA) digunakan untuk mengurangi dimensi data melalui analisa *variance* yang dilakukan dengan PCA dengan membentuk *cluster* untuk tiap *variance* yang dimiliki oleh data. Penelitian ini menghasilkan bahwa *Sustainability* di dalam prosedur sistem *good governance* yang ada di DPRD Kota Pontianak dapat dicapai melalui efektifitas dan efisiensi dimana hal ini berdampak pada kesejahteraan. Hal ini didasarkan jika kualitas atau *outcome* dari SDM yang ada itu baik. Kualitas SDM disini sangat diperlukan dan sangat penting dalam menunjang keberlangsungan sistem *good governance* yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Good Governance, Effectiveness, Sustainability, Principal Component Analysis, Partial Least Squares*

[✉]Alamat korespondensi:

Politeknik Negeri Pontianak

Jl. Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia

E-mail: minsut_benuis@yahoo.co.id

PENDAHULUAN

Instansi pemerintahan selalu memiliki tolak ukur dalam pencapaian tujuan organisasi melalui visi dan misi yang dimiliki. Efektivitas kinerja merupakan tolak ukur yang digunakan dalam pencapaian visi, misi, tujuan instansi atau lembaga dengan berkualitas dan bertanggung jawab. Hal ini dimiliki, dibebankan, dan menjadi tanggung jawab setiap pegawai yang terdapat di instansi pemerintahan tersebut.

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan masalah yang paling penting dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah sejalan dengan meningkatkannya tingkat pengetahuan masyarakat disamping adanya pengaruh globalisasi.

Lembaga, terutama lembaga publik, dapat berkontribusi besar pada pemeliharaan hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, kondisi makro ekonomi yang stabil, meningkatkan kondisi kesehatan, mengelola dan memobilisasi sumber daya untuk layanan publik yang penting (Johnston, 2002).

Transparansi merupakan salah satu prinsip dari *good governance*. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau (Coryanata, 2015). Kebijakan publik harus mempertimbangkan kebutuhan

dan aspirasi semua lapisan masyarakat, untuk memastikan bahwa semua manusia dapat memenuhi potensinya dalam martabat dan kesetaraan. Sikap menghormati, melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia dan kebebasan yang mendasar untuk semua, akses ke layanan publik harus diberikan dengan syarat kesetaraan umum, tanpa perbedaan dalam bentuk apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran, kecacatan atau status lainnya (Sar, 2018).

Akuntabilitas membutuhkan transparansi, keduanya saling berkaitan dan saling mendukung, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ini membutuhkan keseimbangan yang halus namun tahan lama antara kepentingan pribadi dan kerja sama: warga negara dan pejabat harus melihat pemerintahan yang baik tidak hanya sebagai ideal, tetapi juga sebagai peningkatan kehidupan mereka sendiri. Menurut Mardiasmo (2012) mendefinisikan akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan kepada pihak pemberi amanah (*principal*).

Efektivitas kinerja pegawai atau organisasi merupakan indikator tingkatan prestasi yang dapat dicapai dan mencerminkan keberhasilan suatu organisasi, serta merupakan hasil yang dicapai dari perilaku anggota organisasi. Efektivitas kinerja dapat dilihat melalui hasil (*output*) dari suatu proses tertentu yang dilakukan oleh seluruh komponen organisasi terhadap sumber-sumber tertentu yang digunakan (*input*).

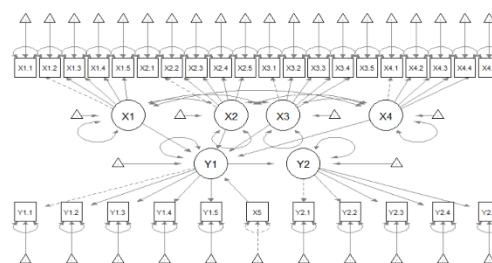
Mengenai pengaruh tata kelola yang baik terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, sudah ada banyak penelitian yang membicarakan tentang hubungan ini. Beberapa penelitian menemukan hubungan yang positif dan yang lain menemukan hubungan negatif. Namun, sebagian besar studi telah menunjukkan dampak positif dan langsung untuk mencapai target pembangunan seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan lapangan kerja, redistribusi pendapatan yang lebih adil (Dhaoui, 2019). Pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan keputusan dan tindakan yang tepat untuk mencapainya. Hubungan dalam efektivitas kinerja terhadap pembangunan yang berkelanjutan oleh Dhaoui (2019) sangat berpengaruh, dan memiliki dampak yang besar.

Pertimbangan estimasi kemungkinan maksimum, Hair et al. (2010) menyarankan ukuran sampel yang sesuai berkisar antara 250 s/d 300 orang. Data sampel yang ada hanya sebesar 50. Hal ini tentu tidak dapat mencukupi ukuran sampel yang harus digunakan dalam Amos SEM. Untuk mengatasi hal itu maka penulis menggunakan analisa *Principal Component Analysis (PCA)* dan *Partial Least Square (PLS)* untuk melihat nilai determinan *good governance* terhadap efektivitas kinerja (*effectiveness*) kerja pegawai kantor DPRD kota Pontianak dan nilai determinan dari efektivitas kinerja (*effectiveness*) dalam pencapaian tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan (*effective governance for sustainability development*).

METODE

Principal Component Analysis (PCA)

Model analisis PCA ini menggunakan model struktural yaitu, inner model dan outer model. Inner model menunjukkan model hubungan antara variabel, dan outer model memperlihatkan indikator atau variabel manifes. Indikator yang reflektif memperlihatkan pengamatan dari faktor akibat latent variabel, sedangkan indikator formatif tersebut memperlihatkan faktor penyebab untuk latent variabel.



Gambar 2

PCA menyeleksi dan membentuk sebuah variabel baru melalui *principal component* dengan mempertimbangkan nilai *variance*. Prinsip dari PCA untuk mengurangi dimensi data yang memiliki jumlah sangat banyak. Analisa *variance* yang dilakukan oleh PCA untuk mengumpulkan seluruh data data dan membentuk *cluster* untuk tiap *variance* yang dimiliki oleh data. Proses PCA menyeleksi dan membentuk sebuah variabel baru melalui *principal component* dengan mempertimbangkan nilai *variance*. PCA melalui prosesnya kemudian membentuk nilai *eigen vector* dan *eigen value*.

Pertama, PCA melihat fungsi linear yang dimiliki dari data tersebut $\alpha_1'x = y_i$ dari elemen x yang memiliki maksimum *variance*. Dimana α_1 adalah *vector* dari p yang konstan

$\alpha_{11}, \alpha_{12}, \dots, \alpha_{1p}$ di dalam fungsi sebagai berikut (Jolliffe, 2010).

$$\alpha'_i x = \alpha_{i1}x_1 + \alpha_{i2}x_2 + \dots + \alpha_{ip}x_p = \sum_{j=1}^p \alpha_{ij}x_j, \quad i=1,2, \dots,p$$

Kedua, cari fungsi linear untuk $\alpha'_2 x$, fungsi linear pertama dan kedua memiliki fungsi yang terpisah dalam prosesnya. Jadi pada i th di linear fungsi $\alpha'_i x$ di temukan secara terpisah nilai maksimum variance dengan fungsi $\alpha'_1 x, \alpha'_2 x, \dots, \alpha'_{i-1} x$. Nilai i th terdapat dalam fungsi variabel $\alpha'_i x$ yang merupakan nilai *principal component* yang ke i th. Secara umum variance dari x akan di hitung dalam proses *Principal Component* (PC). Berikut dibawah ini merupakan langkah dalam memaksimalkan nilai dari proses PC:

$$\alpha_i^T \alpha_i = 1, \quad i = 1,2,3, \dots, p$$

Cari nilai α_1 yang merupakan nilai maksimum dari $\text{Var}(y_1)$. Kemudian cari nilai α_2 , seperti $\alpha_i^T \alpha_i = 0$ dan secara umum dapat ditulis $\alpha_i^T \alpha_j = 0, i \neq j$.

Komponen pertama, secara matematika nilai secara maksimum harus dapat dicapai.

$$\max \alpha_1^T \Sigma \alpha_1 - \lambda (\alpha_1^T \alpha_1 - 1)$$

Dimana λ adalah *Lagrangian multiplier*. Optimisasi permasalahan diatas untuk menghasilkan nilai 0 dalam mencapai nilai α yang optimal:

$$\Sigma \alpha_1 - \lambda \alpha_1 = 0, \text{ dan } (\Sigma - \lambda I_p) \alpha_1 = 0$$

I_p disini memiliki matrix $p \times p$ sebagai identitas matrix. λ adalah *eigen value* dari Σ dan α_1 adalah *eigen vector*. Untuk mengetahui p *eigen vector* $\alpha'_i x$ yang

memiliki *variance* yang lebih besar, maka nilai persamaan yang perlu di maksimal kan adalah:

$$\alpha'_i \Sigma \alpha_1 = \alpha'_i x \lambda \alpha_1 = \lambda \alpha'_i \alpha_1 = \lambda$$

Jadi nilai λ harus memiliki nilai yang besar, sehingga α_1 *eigen vector* harus cukup besar untuk merespon *eigen value* dari Σ yang besar. Dimana $\text{var}(\alpha'_i x) = \alpha'_i \Sigma \alpha_1 = \lambda_1$ sebagai *eigen value* yang memiliki nilai terbesar.

Partial Least Squares

Partial least squares dikembangkan sejak 1960 yang merupakan metode penelitian secara umum yang didukung oleh *modeling causal path* pada multivariate yang di dukung dengan banyak *Latent Variable (LV)* di dalam *Structural Equation Modeling* atau dapat juga disebut juga model PLS – SEM.

Model PLS tidak hanya digunakan untuk menilai hubungan indikator melalui LV yang kecenderungan reflektif. Algoritma yang digunakan PLS dipakai juga untuk hubungan formatif. Kedua PLS dapat digunakan untuk path modeling yang memiliki sample yang terbatas. Ketiga, PLS digunakan untuk metode yang kompleks (terdiri dari banyak variabel dan indikator).

Model analisis PLS ini menggunakan model struktural yaitu, inner model dan outer model. Inner model menunjukkan model hubungan antara variabel, dan outer model memperlihatkan indikator atau variabel manifes. Indikator yang reflektif memperlihatkan pengamatan dari faktor akibat latent variabel, sedangkan indikator formatif tersebut memperlihatkan faktor penyebab untuk latent variabel.

Penerapan PCA dalam regresi sebagai teknik pengurangan dimensi serta menggunakannya untuk menangani masalah multi-kolinearitas. Salah satu kelemahan dari teknik PCA dalam bentuk aslinya adalah bahwa ia tiba di SLC yang hanya menangkap karakteristik variabel X-vektor atau prediktif. Tidak ada kepentingan yang diberikan pada bagaimana setiap variabel prediktif mungkin terkait dengan variabel dependen atau target. Di satu sisi itu adalah teknik pengurangan dimensi tanpa pengawasan. Ketika area utama aplikasi metode ini adalah regresi multivariat, Partial least square (PLS) memungkinkan kita untuk mencapai keseimbangan ini dan memberikan pendekatan alternatif untuk teknik PCA. Pengukuran ini sering dikaitkan dengan beberapa faktor laten yang mendasari yang tetap tidak teramati. Pada bagian ini, akan menjelaskan teknik PLS dan mendiskusikan bagaimana hal itu dapat diterapkan dalam masalah regresi dengan menunjukkannya pada data sampel.

Asumsikan X adalah matriks $n \times p$ dan Y adalah matriks $n \times q$. Teknik PLS bekerja dengan berturut-turut mengekstraksi faktor dari kedua X dan Y sehingga kovarians antara faktor diekstraksi dimaksimalkan. Metode PLS dapat bekerja dengan variabel respons multivariat (yaitu, ketika Y adalah vektor $n \times q$ dengan $q > 1$). Namun, untuk tujuan kami, kami akan berasumsi bahwa kami memiliki variabel respons tunggal (target) yaitu, Y adalah $n \times 1$ dan X adalah $n \times p$, seperti sebelumnya.

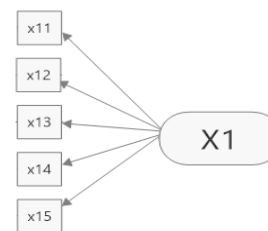
Teknik PLS mencoba untuk menemukan dekomposisi linear X dan Y sehingga $X = TP^T$ dan $Y = UQ^T + F$, dimana

$$\begin{aligned} T_{n \times r} &= X\text{-skor} & U_{n \times r} &= Y\text{-skor} \\ P_{p \times r} &= X\text{-loading} & Q_{1 \times r} &= Y\text{-loadings} \\ E_{n \times p} &= X\text{-residual} \\ F_{n \times 1} &= Y\text{-residual} (1) \end{aligned}$$

Dekomposisi diselesaikan sehingga dapat memaksimalkan kovarians antara T dan U . Ada beberapa algoritma yang tersedia untuk memecahkan masalah PLS. Namun, semua algoritma mengikuti proses berulang untuk mengekstrak skor X dan skor Y .

Faktor-faktor atau skor untuk X dan Y diekstraksi berturut-turut dan jumlah faktor yang diekstraksi tergantung pada peringkat X dan Y . Dalam kasus ini, Y adalah vektor dan semua faktor X yang mungkin akan diekstraksi.

PEMBAHASAN

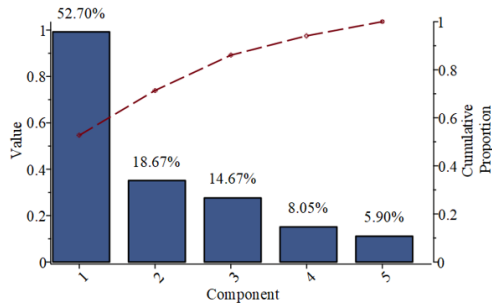


Gambar 3 Model Participation

Model diatas menerangkan variabel manifest dari x11 adalah peluang yang sama dalam pekerjaan, x12 peluang yang sama dalam mendapatkan pelatihan/workshop, x13 peluang yang sama dalam penyampaian gagasan di rapat, x14 peluang yang sama dalam promosi jabatan, x15 peluang yang sama ikut serta dalam pengembangan organisasi.

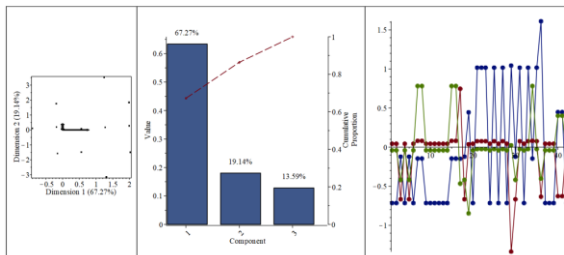
Gambar 4 menunjukkan pengaruh x11 sebesar 52.7% dengan nilai eigen values sebesar 0.9921, x12 sebesar 18.67% dengan nilai eigen values 0.3515, x13 sebesar 14.67% dengan nilai eigen values 0.2762, x14 sebesar 8.05%

dengan nilai eigen values 0.1515, dan x15 sebesar 5.90% dengan nilai eigen values sebesar 0.1111.



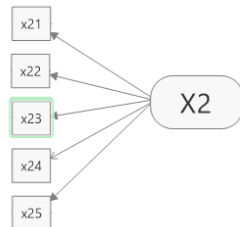
Gambar 4 Participation Scree Plot sebelum PCA

Gambar 5 dibawah ini memperlihatkan hasil dari proses pengurangan dimensi dengan PCA sehingga memperoleh hasil proporsi *variance* untuk x11 sebesar 67.27% dengan nilai eigen values 0.6337, x14 sebesar 19.45% dengan nilai eigen values 0.1803, x15 sebesar 13.59% dengan nilai eigen values 0.1281.



Gambar 5 Participation Plot setelah PCA

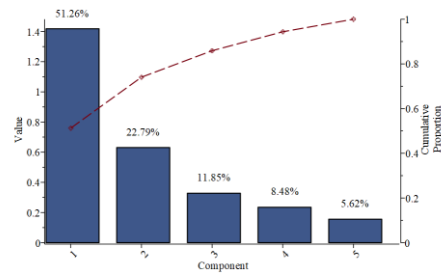
Model berikutnya dibawah ini adalah *transparency* sebelum proses PCA.



Gambar 6 Model Transparency

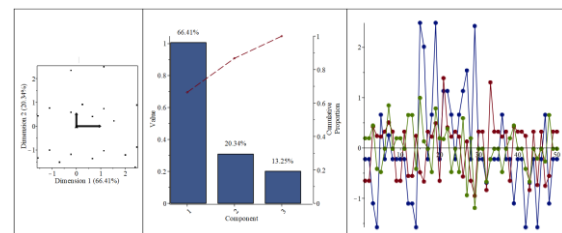
Model diatas adalah variabel manifest yang menerangkan mengenai keterbukaan sistem good governance. Nilai *variance* yang dimiliki oleh model X2 dengan melalui proses PCA dapat

menghasilkan nilai seperti gambar berikut ini.



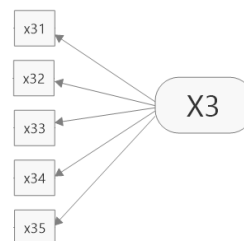
Gambar 6 Transparency Scree Plot sebelum PCA

Gambar di bawah ini menerangkan variabel *transparency* yang telah melalui PCA. Menghasilkan nilai x21 Variabel x21 sebesar 51.26% dan yang paling kecil sebesar 5.62% yang dimiliki oleh variabel x25. Hal ini dapat diputuskan untuk mengurangi variabel yang memiliki *variance* yang kecil.



Gambar 7 Transparency Scree Plot setelah PCA

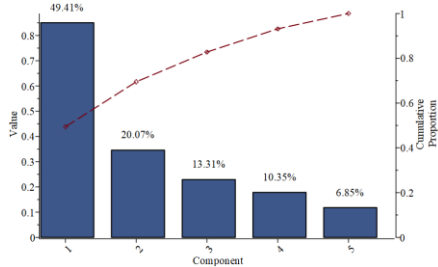
Nilai dari x21 melalui PCA menunjukkan dari gambar diatas memiliki pengaruh sebesar 66.41% dengan nilai *eigen value* 1.0067. Kedua ditunjukkan melalui pengaruh sebesar 20.34% dengan nilai *eigen value* 0.308 untuk variabel x22. Ketiga dengan pengaruh sebesar 13.25% dengan nilai *eigen value* sebesar 0.2008 oleh variabel x23.



Gambar 8 Model Equity

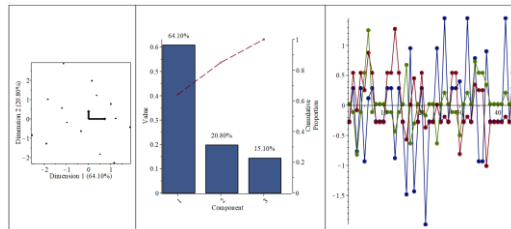
Model berikutnya dibawah ini adalah *equity* sebelum proses PCA. Nilai

presentase *variance* yang dimiliki oleh model *equity* adalah 49.41% untuk x31, 20.07% untuk x32, 13.31% untuk x33, 10.35% untuk x34 dan yang terendah sebesar 6.85% variabel x35.



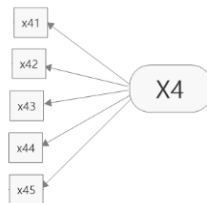
Gambar 9 Equity Scree Plot sebelum PCA

Gambar 10 menunjukkan bahwa ke 3 variabel manifes melalui proses PCA mendapatkan nilai *variance* yang cukup tinggi sebesar 64.10% untuk x31 dengan nilai eigen values 0.6086, 15.10% untuk nilai x32 dengan nilai eigen values 0.1975 dan 20.80% untuk nilai x34 dengan nilai eigen values 0.1433.



Gambar 10 Equity Scree Plot setelah PCA

Berikut ini adalah model *accountability* sebelum proses PCA

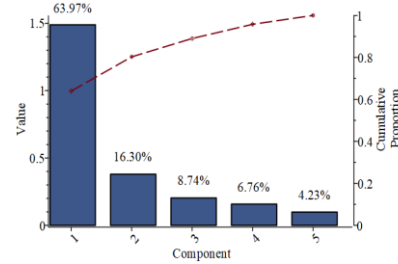


Gambar 11 Model Accountability

Model diatas adalah variabel manifest yang menerangkan mengenai penilaian sistem yang terukur dari sistem *good*

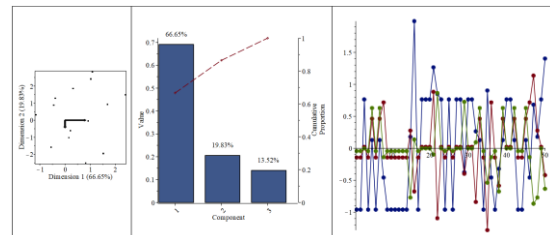
governance yang diterapkan.

Nilai yang di peroleh untuk *variance* model *accountability* adalah sebesar 63.97% untuk x41, 4.23% untuk x45 yang terendah.



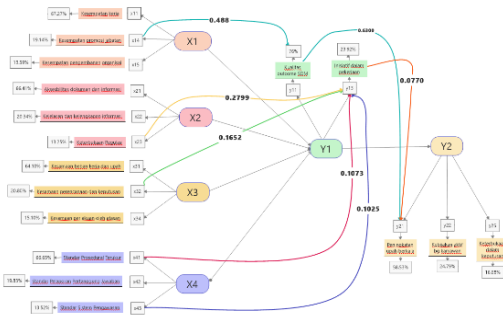
Gambar 12 Accountability Scree Plot sebelum PCA

Model dibawah ini memiliki besaran *variance* secara berurutan dari nilai terbesar sampai terendah. Nilai dari x41 menunjukkan dari gambar diatas memiliki pengaruh sebesar 66.65% dengan nilai *eigen value* 0.6910. Kedua ditunjukkan melalui pengaruh sebesar 19.83% dengan nilai *eigen value* 0.2056 oleh variabel x42. Ketiga dengan pengaruh sebesar 13.63% dengan nilai *eigen value* sebesar 0.2004 oleh variabel x43. Keempat dengan pengaruh sebesar 13.52% dengan nilai *eigen value* sebesar 0.1401 oleh variabel x43.



Gambar 13 Accountability Scree Plot setelah PCA

Perhitungan melalui PCA di atas menghasilkan vif (*variance inflation factor*) sebesar 1.7320 hal ini memperlihatkan bahwa variabel manifest setelah melalui proses PCA multikolinearitas diantara variabel variabel sangat rendah.



Gambar 14 Hasil Analisa Metode Partial

Hasil outer model diatas menunjukkan bahwa kesempatan kerja bagi tiap karyawan, kesempatan promosi jabatan, kesempatan ikut serta dalam pengembangan organisasi, aksesibilitas dokumen atau informasi, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan regulasi prosedur, kesetaraan beban pekerjaan dan upah kerja, kesetaraan perlakuan dari atasan, standar prosedural pekerjaan yang terukur, standar pelaporan pekerjaan, standar sistem pengawasan. Variabel-variabel diatas merupakan informasi standar dari sistem dari *good governance* yang terlaksana di DPRD Kota Pontianak.

Bukti ini memberikan hasil jika kesempatan bekerja diberikan kepada tiap orang (karyawan) hal ini dapat memberikan pengaruh yang cukup efektif dengan nilai 67.27%, pengaruh sebuah kesempatan untuk mendapatkan promosi jabatan sebesar 19.14%, pengaruh kesempatan dalam kesertaan karyawan dalam pengembangan organisasi 13.59%. Kebutuhan informasi dalam keterbukaan dokumentasi dan informasi sebesar 66.41%, pengaruh kejelasan dan tersediannya kelengkapan informasi sebesar 20.34%, keterbukaan regulasi prosedural sebesar 13.25%. Kesamaan dalam beban kerja dan upah 64.10%. Kesamaan dalam pelaksanaan dan perencanaan keputusan sebesar 20.80%,

kesamaan perlakuan oleh atasan sebesar 15.10%. Standar prosedural yang terukur sebesar 66.65%, Standar pelaporan pertanggung jawaban sebesar 19.83%, standar sistem pengawasan sebesar 13.52%. Seperti gambar di bawah ini menjelaskan seberapa besar pengaruh variabel independen dari *good governance* tersebut terhadap efektifitas prosedural sistem yang digunakan di DPRD Kota Pontianak

Besarnya bentuk partisipasi karyawan untuk mendapatkan promosi kenaikan jabatan terhadap kualitas karyawan dalam pekerjaan dengan nilai 0.48859, x23 sistem keterbukaan informasi terhadap y13 sebagai nilai dari inisiatif karyawan untuk bekerja dengan nilai 0.2799, x32 sebagai nilai dari kesamaan hasil keputusan dalam perencanaan dengan pelaksanaannya mempengaruhi y12 yaitu ketepatan waktu dalam penyelesaian pekerjaan dengan nilai 0.1652, x41 pelaksanaan prosedural yang terukur berpengaruh terhadap y12 ketepatan waktu dalam penyelesaian pekerjaan dengan nilai 0.1073, x43 nilai dari standar pengawasan pelaksanaan tugas dari kebijakan terhadap y12 ketepatan waktu dalam penyelesaian pekerjaan dengan nilai 0.1205.

Pengaruh yang cukup besar terletak pada motivasi kesempatan untuk mendapatkan promosi jabatan, hal ini mempengaruhi kualitas SDM masing masing individu untuk memiliki prestasi di tempat bekerja khusus nya di DPRD Kota Pontianak. Peningkatan kualitas SDM dari tiap karyawan yang bekerja tersebut mempengaruhi peningkatan upah secara berkala yang diberikan, hal ini merupakan *sustainable development* di dalam sistem *good governance*.

Nilai variabel inisiatif dalam bekerja oleh karyawan ini di pengaruhi oleh

keterbukaan regulasi, kesamaan perencanaan dan keputusan dalam kebijakan yang diambil, standar prosedural yang terukur, standar sistem pengawasan yang baik. Dalam pengaruhnya terhadap perkembangan yang berkelanjutan (*sustainable development*) hal ini berpengaruh tetapi kecil dibandingkan dengan variabel kualitas SDM.

Pada studi kasus di DPRD Kota Pontianak dalam penerapan *good governance* disimpulkan bahwa kualitas SDM dari para karyawan dan inisiatif bekerja dari karyawan sangat mempengaruhi sistem *good governance* yang berkelanjutan. Kebijakan yang proaktif bagi karyawan terkait dalam efektifitas dan efisiensi yang dihasilkan oleh sumber daya manusia maupun sumber daya yang lainnya itu sangat penting. Hal ini dapat berpengaruh pada pengembangan yang berkelanjutan (*sustainable development*) di sistem *good governance* yang diterapkan khususnya di DPRD Kota Pontianak.

DAFTAR PUSTAKA

- Benitez, J., Henseler, J., Castillo, A., & Schuberth, F. (2019). How to perform and report an impactful analysis using partial least squares : Guidelines for confirmatory and explanatory IS research. *Elsevier, May*, 103168. <https://doi.org/10.1016/j.im.2019.05.003>.
- Bond, A. J., & Morrison-saunders, A. (2011). Re-evaluating Sustainability Assessment : Aligning the vision and the practice. *Environmental Impact Assessment Review*, 31(1), 1–7. <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2010.01.007>.
- Dhaoui, I. (2019). Good Governance for Sustainable Development. *Munich Personal RePEc Archive*, 92544.
- Diamantopoulos, A. (2017). Incorporating Formative Measures into Covariance-Based.
- Farahani, H. A., Rahiminezhad, A., Same, L., & Immanezhad, K. (2010). A comparison of Partial Least Squares (PLS) and Ordinary Least Squares (OLS) regressions in predicting of couples mental health based on their communicational patterns. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 5, 1459–1463. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.07.308>.
- Gaghman, A. (2019). The Importance of Good Governance on Achieving Sustainable Development Case Study: Yemen. *Knowledge E*, 2019, 170–192. <https://doi.org/10.18502/kss.v4i1.5987>
- Güney, T. (2016). Governance and sustainable development : How effective is governance ? Governance and sustainable development : How effective. *The Journal of International Trade & Economic Development*, 8199(November). <https://doi.org/10.1080/09638199.2016.1249391>
- Irwan, & Adam, K. (2015). Metode Partial Least Square (PLS) Dan Terapannya (Studi Kasus: Analisis Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan PDAM Unit

PENUTUP

Sustainability di dalam prosedur sistem *good governance* di DPRD Kota Pontianak dapat dicapai melalui peningkatan kualitas SDM dan peningkatan motivasi (inisiatif) karyawan dalam bekerja. Sehingga dampak dari hal tersebut dapat meningkatkan upah secara berkala bagi para karyawan. Jadi faktor SDM disini sangat di perlukan dan penting keberlangsungan sistem *good governance* yang berkelanjutan.

Keterbukaan regulasi, keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan, standar prosedural yang terukur, standar sistem pengawasan yang baik, semua itu akan mendukung dan mendorong inisiatif tiap karyawan untuk melakukan pekerjaan dan tanggung jawab nya sehingga pengembangan yang berkelanjutan di sistem *good governance* dapat tercapai.

- Camming Kab. Bone). *Teknosains*, 9(1), 53–68.
- Johnston, M. (2002). Good Governance : Rule of Law , Transparency , and Accountability. *UN Millennium Developments Goals*.
- Jolliffe, I. T. (2010). Principal Components Analysis. In *International Encyclopedia of Education*.
<https://doi.org/10.1016/B978-0-08-044894-7.01358-0>
- Keuleers, P. (2014). Governance for Sustainable Development. In *United Nations Development Programme* (Issue March 2014).
- Lozano, R., Ceulemans, K., Alonso-almeida, M., Huisingh, D., Lozano, F. J., Waas, T., Lambrechts, W., Lukman, R., & Hug, J. (2014). A review of commitment and implementation of sustainable development in higher education : results from a worldwide survey. *Journal of Cleaner Production*.
<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.09.048>.
- Nag, N. S. (2018). Government, Governance and Good Governance. *Indian Journal of Public Administration*, 64(1), 122–130.
<https://doi.org/10.1177/0019556117735448>.
- Niedlich, S., Bauer, M., Doneliene, M., Jaeger, L., Rieckmann, M., & Bormann, I. (2020). Assessment of sustainability governance in higher education institutions—a systemic tool using a governance equalizer. *Sustainability (Switzerland)*, 12(5), 1–17.
<https://doi.org/10.3390/su12051816>.
- Otusanya, O. J. (2010). *An investigation of tax evasion, tax avoidance and corruption in Nigeria*.
- Sar, A. K. (2018). Impact of corporate governance on sustainability: A study of the Indian FMCG industry. *Academy of Strategic Management Journal*, 17(1), 1–10.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT.Alfabet.
- T, G. K. (2011). Good Governance Enhance the Efficiency and Effectiveness Public Spending -Sub Saharan Countries. *African Journal of Business Management*, 5(11), 3995–3999.
<https://doi.org/10.5897/AJBM09.111>